

**RENCANA AKSI PERGESERAN (REFOCUSING) TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

No	Eselon II				Eselon III			Eselon IV				Anggaran				
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target				Program	Sasaran Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan		Target			
			TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV							TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
1	Terselenggaranya birokrasi DPMPSTP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP				100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA AKUNTABEL KABUPATEN/ KOTA	Tercapainya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>					Rp 2,963,623,592
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	0%	0%	0%	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0%	0%	0%	100%	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0%	100%	0%	0%	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	0%	0%	0%	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	0%	0%	100%	0%		

									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0%	50%	50%	0%
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50%	0%	0%	50%
									<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36%	29%	21%	14%
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25%	25%	25%	25%
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan/Bulanan/Triwulanan/ Semestean SKPD	20%	35%	30%	15%
									<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33%	22%	22%	22%

										<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>								
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42%	19%	39%	0%				
										<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas</b>								
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	46%	46%	8%	0%				
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	66%	0%	34%	0%				
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26%	37%	33%	3%				
										<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>								
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	0%	0%	0%				
										<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>								
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan	6%	78%	11%	5%				



										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25%	25%	25%	25%	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25%	25%	25%	25%	
										<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>					
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36%	12%	39%	13%	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	46%	29%	21%	4%	
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	10%	25%	30%	35%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Regulasi Penanaman Modal</b>					
										Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	10%	84%	0%	6%	Rp 12,826,000
										<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peta Potensi Investasi Tersedia</b>					

									Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	81%	19%	0%	0%		
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Investor	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Promosi Investasi diikuti</b>				Rp 2,000,000	
										Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/Kota	50%	0%	50%	0%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Penanaman Modal	IKM	10%	25%	30%	35%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online</b>					
										Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	28%	24%	22%	26%	
										Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	96%	2%	2%	0%	Rp 50,610,120

									Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinana	72%	0%	0%	28%		
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas atau insentif daerah	95%	0%	0%	5%		
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM</b>					
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	88%	0%	12%	16%	Rp 536,443,000	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	13%	26%	47%	14%		
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	19%	37%	28%	16%		

							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Laporan Database perizinan dan Non Perizinan	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan						Rp 37,380,520
										Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	43%	13%	20%	24%		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>																	Rp 3,602,883,232

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB.MAMUJU

  
  
**HJ. HASNAWATY SYAM, SE.M.Si<sup>A</sup>**  
**Pangkat : Pembina TK.I IV/b**  
**NIP : 19680928200604 2 002**